

SAKALIMA
PILAR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENDIDIKAN
VOL 3. NO. 2 (2026)

ISSN: 3064-2361

Moderasi Beragama dalam Tradisi Pendidikan Islam Melayu: Antara Normativitas dan Praktik Sosial

Ari Koswara, Eprianto, Abdullah Idi, dan Abdillah Asmara

To cite this article Koswara, A., Eprianto, Idi, A., Asmara, A. Moderasi Beragama dalam Tradisi Pendidikan Islam Melayu: Antara Normativitas dan Praktik Sosial. *SAKALIMA Pilar Pemberdaya. Masy. Pendidik.*, vol. 3, no. 2, pp. 189–199, 2026. https://doi.org/10.70211/sakalima.v3i2.444

To link to this article:

Published online: June. 10, 2026

Submit your article to this journal

View crossmark data

Full Terms & Conditions of access and use can be found at
https://journal.wiseedu.co.id/index.php/sakalima/about

OPEN ACCESS

https://doi.org/10.70211/sakalima.v3i2.444

SAKALIMA: Pilar Pemberdayaan Masyarakat Pendidikan Vol. 3 No. 2 (2026)

Check for updates

Research Article

Moderasi Beragama dalam Tradisi Pendidikan Islam Melayu: Antara Normativitas dan Praktik Sosial

Ari Koswara, Eprianto, Abdullah Idi, Abdillah Asmara

Received: 28 Februari 2026	Revised: 23 April 2026	Accepted: 28 Mei 2026	Online: 10 Juni 2026

Abstract

This article examines religious moderation in the Malay Islamic educational tradition by analyzing the relationship between Islamic normativity, social practice, and local cultural wisdom. The study responds to the limited discussion that connects the normative concept of *wasatiyyah* with everyday educational practices in pesantren, surau, and Malay Islamic learning communities. This research employed a qualitative descriptive-interpretive literature review by examining classical Islamic texts, contemporary peer-reviewed studies, policy documents on religious moderation, and studies on Malay Islamic culture, pesantren, and local wisdom published mainly between 2018 and 2026. The findings show that religious moderation in Malay Islamic education is constructed through three interrelated dimensions: normative values such as *tawassuth*, *tasamuh*, *tawazun*, and *i'tidal*; social practices such as teacher exemplarity, dialogical learning, respect for difference, and community-based education; and local wisdom that functions as a cultural filter against exclusivist and transnational religious narratives. The study also finds that digital disruption challenges traditional religious authority and requires Malay Islamic educational institutions to strengthen religious moderation through contextual pedagogy, culturally grounded leadership, and digital literacy. The novelty of this article lies in its integrative reading of religious moderation as a dialectical process between Islamic normativity and Malay social practice. The study implies that strengthening religious moderation in Islamic education should not rely solely on formal curriculum, but also on institutional culture, local wisdom, teacher role modeling, and responsible digital engagement.

Keywords: Islamic Education; Local Wisdom; Malay Tradition; Religious Moderation; Social Practice

Publisher's Note:

WISE Pendidikan Indonesia stays neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

Copyright:
©
2026 by the author(s).
License WISE Pendidikan Indonesia, Bandar Lampung, Indonesia. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) license.
(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0//).



PENDAHULUAN

Moderasi beragama menjadi salah satu agenda penting dalam pendidikan Islam kontemporer karena lembaga pendidikan tidak hanya bertugas mentransmisikan pengetahuan keagamaan, tetapi juga membentuk cara pandang keagamaan yang adil, seimbang, inklusif, dan mampu hidup bersama dalam masyarakat majemuk. Dalam konteks Indonesia, moderasi beragama dipahami sebagai cara beragama yang menolak ekstremitas, mengedepankan kemanusiaan, menghormati kesepakatan kebangsaan, serta menjaga harmoni sosial [1], [2], [3]. Kajian tentang moderasi beragama dalam pendidikan Islam menunjukkan bahwa nilai *wasatiyyah* dapat diinternalisasikan melalui kurikulum, budaya sekolah, keteladanan guru, kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler, serta tata kelola lembaga pendidikan yang mendukung dialog dan penghargaan terhadap keberagaman [4], [5], [6].

Dalam tradisi pendidikan Islam Melayu, moderasi beragama memiliki akar historis yang kuat karena proses Islamisasi di wilayah Melayu berlangsung secara dialogis dengan budaya lokal. Islam tidak hadir sebagai kekuatan yang sepenuhnya menggantikan tradisi, melainkan membentuk proses akulturasi yang memungkinkan nilai agama dan kearifan lokal saling memperkuat. Kajian tentang Islam Melayu di Palembang memperlihatkan bahwa nilai moderasi telah hadir dalam pola keberagamaan yang adaptif, egaliter, dan terbuka terhadap tradisi setempat [7]. Kajian lain tentang kearifan lokal menegaskan bahwa praktik sosial masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat Melayu, dapat menjadi ruang aktualisasi nilai moderasi karena tradisi lokal sering memuat norma penghormatan, musyawarah, kesantunan, dan harmoni sosial [8], [9], [10].

Secara normatif, moderasi beragama berakar pada prinsip *wasatiyyah* yang mencakup sikap jalan tengah, toleransi, keseimbangan, keadilan, dan kemaslahatan. Nilai ini selaras dengan tujuan pendidikan Islam yang tidak hanya membentuk kepatuhan ritual, tetapi juga karakter sosial yang mampu menghadirkan Islam sebagai rahmat bagi kehidupan bersama. Dalam konteks pendidikan, *wasatiyyah* perlu dipahami bukan hanya sebagai materi ajar, tetapi sebagai orientasi pedagogis yang mengarahkan proses pembelajaran, relasi guru-peserta didik, budaya lembaga, dan cara lembaga pendidikan merespons perbedaan [11], [12], [13].

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas moderasi beragama dalam pendidikan Islam. Afwadzi dan Miski menunjukkan bahwa moderasi di perguruan tinggi Islam dibangun melalui kebijakan, kurikulum, literasi keagamaan, dan lingkungan akademik yang inklusif [3]. Muqowim et al. menegaskan pentingnya nilai Islam *wasatiyyah* dalam pendidikan madrasah melalui toleransi, reformasi, keseimbangan, dan prioritas kemaslahatan [4]. Nasir dan Rijal menunjukkan bahwa lembaga pendidikan tinggi Islam dapat menjadi ruang utama pengarusutamaan moderasi [5], sedangkan Burhanuddin dan Ilmi memetakan tipologi moderasi pada institusi pendidikan tinggi Islam Indonesia [14]. Namun, kajian-kajian tersebut umumnya menekankan aspek kelembagaan, kurikulum, atau kebijakan pendidikan secara umum, sementara pembacaan yang secara spesifik mengaitkan normativitas Islam dengan praktik sosial dalam tradisi pendidikan Islam Melayu masih terbatas.

Keterbatasan lain tampak pada kecenderungan sebagian studi yang memandang moderasi beragama sebagai agenda normatif atau kebijakan formal, sehingga kurang menyoroti bagaimana nilai tersebut bekerja dalam praktik sosial sehari-hari. Padahal, dalam pendidikan Islam Melayu, nilai moderasi tidak hanya hidup dalam doktrin, tetapi juga dalam tradisi guru-murid, adab bermasyarakat, musyawarah, penghormatan terhadap ulama,

penggunaan bahasa dan simbol budaya, serta pola pendidikan berbasis komunitas. Tradisi lokal semacam ini berperan sebagai *hidden curriculum* yang membentuk karakter moderat melalui pembiasaan, keteladanan, dan partisipasi sosial [15], [16].

Pada saat yang sama, pendidikan Islam Melayu menghadapi tantangan baru akibat globalisasi, penetrasi paham keagamaan transnasional, dan disrupsi digital [17], [18]. Media sosial telah memperluas akses terhadap pengetahuan agama, tetapi juga memungkinkan munculnya otoritas keagamaan baru yang tidak selalu memiliki sanad keilmuan, kepekaan budaya, atau komitmen pada harmoni sosial. Studi tentang moderasi beragama di era digital menunjukkan bahwa pendidikan Islam perlu mengembangkan literasi digital, kemampuan berpikir kritis, dan strategi kontra-narasi agar peserta didik tidak mudah terpapar narasi intoleran atau ekstrem [19], [20].

Berdasarkan celah tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis moderasi beragama dalam tradisi pendidikan Islam Melayu dengan menyoroti relasi antara normativitas ajaran Islam dan praktik sosial masyarakat. Secara khusus, artikel ini mengkaji konstruksi normatif nilai moderasi, bentuk implementasinya dalam praktik pendidikan, peran kearifan lokal sebagai filter kultural, serta tantangan yang muncul akibat paham transnasional dan disrupsi digital. Kebaruan artikel ini terletak pada pembacaan integratif yang menempatkan moderasi beragama sebagai proses dialektis antara nilai normatif Islam, praktik sosial pendidikan, dan kearifan lokal Melayu.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain kajian pustaka deskriptif-interpretatif. Istilah kajian pustaka deskriptif-interpretatif digunakan karena penelitian tidak melakukan prosedur *systematic literature review* secara ketat dengan penelusuran berbasis protokol PRISMA, melainkan menyintesis sumber-sumber teoretis dan empiris yang relevan untuk memahami relasi antara normativitas Islam dan praktik sosial dalam pendidikan Islam Melayu. Pendekatan ini sesuai untuk mengkaji fenomena konseptual-kultural karena memungkinkan peneliti menafsirkan teks, konteks, dan praktik sosial secara integratif [21], [22].

Sumber data terdiri atas artikel jurnal *peer-reviewed*, buku akademik, dokumen kebijakan moderasi beragama, dan kajian tentang Islam Melayu, pesantren, kearifan lokal, serta pendidikan Islam. Literatur utama diprioritaskan pada publikasi tahun 2018–2026, sedangkan sumber klasik atau buku konseptual tetap digunakan apabila diperlukan sebagai fondasi teoretis. Penelusuran dilakukan melalui Google Scholar, Garuda, DOAJ, dan laman jurnal terindeks nasional maupun internasional dengan kata kunci seperti “religious moderation”, “moderasi beragama”, “Islam Melayu”, “Malay Islamic education”, “local wisdom”, “pesantren moderation”, “Islam *wasatiyyah*”, dan “digital religious authority”.

Kriteria inklusi mencakup sumber yang membahas moderasi beragama, pendidikan Islam, tradisi Melayu, pesantren, kearifan lokal, atau tantangan digital dalam keberagamaan; terbit dalam jurnal bereputasi atau memiliki DOI; dan relevan dengan tujuan penelitian. Kriteria eksklusi mencakup sumber populer tanpa dasar akademik, referensi tanpa identitas publikasi yang jelas, sumber yang tidak dapat diverifikasi, dan rujukan yang tidak berkaitan langsung dengan pendidikan Islam atau moderasi beragama. Berdasarkan kriteria tersebut, referensi yang

tidak lengkap seperti sumber tanpa tahun, tanpa judul publikasi, atau tanpa identitas jurnal yang jelas tidak digunakan dalam versi revisi ini.

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi, kategorisasi, interpretasi, dan sintesis tematik. Literatur yang terkumpul dikodekan ke dalam empat tema utama: konstruksi normatif moderasi, internalisasi dalam praktik pendidikan, fungsi kearifan lokal Melayu, serta tantangan transnasionalisme dan digitalitas. Validitas analisis dijaga melalui triangulasi sumber, kecukupan referensi, konsistensi antara klaim dan sitasi, serta penggunaan multi-sitasi untuk pernyataan konseptual dan empiris yang penting.

Tabel 1. Desain dan Kriteria Kajian Pustaka

Aspek	Kriteria	Tujuan
Jenis kajian	Kajian pustaka deskriptif-interpretatif	Menafsirkan relasi antara konsep normatif dan praktik sosial pendidikan.
Sumber literatur	Artikel jurnal, buku akademik, dokumen kebijakan, dan kajian tentang Islam Melayu serta kearifan lokal	Memperoleh dasar teoretis dan empiris yang relevan.
Rentang publikasi	Prioritas 2018–2026; sumber klasik digunakan sebagai fondasi konseptual	Menjamin kemutakhiran tanpa menghilangkan rujukan dasar.
Kriteria inklusi	Relevan dengan moderasi beragama, pendidikan Islam, Islam Melayu, pesantren, kearifan lokal, atau digitalitas; memiliki DOI atau identitas publikasi jelas	Memastikan kualitas dan keterlacakan rujukan.
Kriteria eksklusi	Sumber populer, rujukan tanpa metadata jelas, duplikasi, dan sumber yang tidak dapat diverifikasi	Menghindari referensi lemah dan tidak akuntabel.
Teknik analisis	Reduksi, kategorisasi, interpretasi, dan sintesis tematik	Menghasilkan pemetaan temuan yang sistematis dan argumentatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Konstruksi Normatif Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam Melayu

Hasil kajian menunjukkan bahwa moderasi beragama dalam tradisi pendidikan Islam Melayu dibangun di atas konstruksi normatif yang menekankan keseimbangan antara ketaatan keagamaan dan harmoni sosial. Nilai-nilai seperti *tawassuth*, *tasamuh*, *tawazun*, *i'tidal*, musyawarah, dan kemaslahatan menjadi unsur utama yang membentuk cara pandang keagamaan moderat. Dalam tradisi pendidikan pesantren, surau, dan lembaga pendidikan Islam Melayu, nilai tersebut tidak hanya hadir dalam pengajaran fikih atau akhlak, tetapi juga dalam pembiasaan adab, penghormatan kepada guru, penerimaan terhadap perbedaan mazhab, dan penekanan pada kesantunan sosial.

Secara normatif, pendidikan Islam Melayu memperlihatkan karakter yang tidak memisahkan teks keagamaan dari konteks sosial. Nilai-nilai agama diajarkan dengan mempertimbangkan adat, bahasa, struktur sosial, dan kebutuhan masyarakat. Hal ini

menjelaskan mengapa moderasi dalam tradisi Melayu tidak dipahami sebagai sikap kompromi yang melemahkan agama, tetapi sebagai kemampuan menjaga prinsip Islam sambil tetap menghargai realitas sosial. Prinsip ini dekat dengan konsep Islam *wasatiyyah* yang menekankan jalan tengah, keadilan, dan prioritas kemaslahatan.

Internalisasi Moderasi dalam Praktik Sosial Pendidikan

Temuan berikutnya memperlihatkan bahwa moderasi beragama dalam pendidikan Islam Melayu lebih kuat ketika diwujudkan melalui praktik sosial daripada hanya diajarkan sebagai konsep. Guru, kiai, ustaz, atau tokoh adat berperan sebagai model moral yang menunjukkan cara menghargai perbedaan, mengelola konflik, dan menjaga kesantunan dalam interaksi sosial. Dalam konteks ini, moderasi menjadi pengalaman belajar yang berlangsung melalui keteladanan, pembiasaan, dialog, kerja sama komunitas, dan keterlibatan lembaga pendidikan dalam kehidupan masyarakat.

Praktik sosial tersebut dapat dilihat pada penggunaan musyawarah sebagai mekanisme penyelesaian masalah, penguatan adab dalam relasi guru dan peserta didik, penghargaan terhadap tradisi lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam, serta keterlibatan lembaga pendidikan dalam kegiatan sosial-keagamaan masyarakat. Dengan demikian, pendidikan Islam Melayu memperlihatkan bahwa moderasi tidak hanya dibentuk oleh kurikulum formal, tetapi juga oleh budaya lembaga, relasi sosial, dan *hidden curriculum* yang hidup dalam komunitas pendidikan.

Kearifan Lokal sebagai Filter Kultural

Kearifan lokal Melayu berfungsi sebagai filter kultural yang membantu masyarakat menyaring paham keagamaan yang eksklusif, kaku, atau tercerabut dari konteks sosial. Nilai adat yang menekankan kesantunan, musyawarah, penghormatan kepada orang tua dan guru, serta harmoni sosial menjadi mekanisme kultural yang memperkuat moderasi. Tradisi lokal tidak diposisikan sebagai lawan agama, tetapi sebagai ruang aktualisasi nilai Islam dalam bentuk yang dapat dipahami dan dijalankan masyarakat.

Hasil sintesis menunjukkan bahwa fungsi kearifan lokal dalam moderasi beragama bekerja melalui tiga mekanisme. Pertama, kearifan lokal menyediakan bahasa budaya yang mudah diterima masyarakat. Kedua, kearifan lokal membentuk norma sosial yang mendorong toleransi dan gotong royong. Ketiga, kearifan lokal memperkuat otoritas keagamaan yang berbasis komunitas sehingga peserta didik tidak hanya belajar dari teks, tetapi juga dari praktik hidup masyarakat yang telah lama menjaga harmoni.

Tantangan Transnasionalisme dan Disrupsi Digital

Meskipun memiliki basis historis dan kultural yang kuat, moderasi beragama dalam pendidikan Islam Melayu menghadapi tantangan dari penetrasi paham transnasional dan disrupsi digital. Paham keagamaan transnasional yang cenderung skripturalis dan eksklusif dapat melemahkan otoritas lokal apabila peserta didik tidak dibekali literasi keagamaan dan literasi digital yang memadai. Media sosial juga memungkinkan penyebaran narasi keagamaan yang simplifikatif, konfrontatif, dan tidak peka terhadap konteks budaya.

Tantangan ini memperlihatkan pentingnya transformasi strategi pendidikan Islam Melayu. Lembaga pendidikan perlu mempertahankan kekuatan tradisi, tetapi sekaligus

mengembangkan kemampuan membaca realitas digital. Moderasi beragama pada era digital menuntut peserta didik mampu membedakan otoritas keilmuan yang kredibel, memahami konteks sosial dari teks keagamaan, dan menggunakan media digital secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, penguatan moderasi beragama perlu mengintegrasikan pendidikan adab, literasi digital, dan kontra-narasi berbasis kearifan lokal.

Tabel 2. Sintesis Temuan Utama Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam Melayu

Tema Temuan	Bentuk Utama	Makna dalam Pendidikan Islam Melayu	Implikasi
Normativitas	*Tawassuth*, *tasamuh*, *tawazun*, *i'tidal*, adab, dan kemaslahatan	Nilai moderasi dipahami sebagai bagian dari ajaran Islam yang menjaga keseimbangan antara teks dan konteks.	Kurikulum perlu menekankan pemahaman substantif, bukan sekadar hafalan istilah.
Praktik sosial	Keteladanan guru, musyawarah, dialog, dan pembiasaan sosial	Moderasi dibentuk melalui budaya lembaga dan pengalaman hidup sehari-hari.	Guru dan tokoh lembaga perlu menjadi model moderasi dalam interaksi nyata.
Kearifan lokal	Adat, bahasa, kesantunan, harmoni, dan nilai komunitas	Tradisi lokal menjadi ruang aktualisasi nilai Islam yang kontekstual.	Pendidikan Islam Melayu perlu mempertahankan lokalitas sebagai kekuatan pedagogis.
Tantangan kontemporer	Transnasionalisme, ekstremisme digital, dan disrupsi otoritas keagamaan	Moderasi menghadapi narasi yang lebih cepat menyebar melalui media digital.	Diperlukan literasi digital, kontra-narasi, dan penguatan otoritas keilmuan lokal.

Pembahasan

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa moderasi beragama dalam tradisi pendidikan Islam Melayu merupakan hasil perjumpaan antara nilai normatif Islam dan praktik sosial yang hidup dalam masyarakat. Temuan ini sejalan dengan Afwadzi dan Miski yang menegaskan bahwa moderasi beragama di lembaga pendidikan Islam tidak cukup dipahami sebagai konsep abstrak, tetapi perlu diinstitusionalisasikan melalui kurikulum, budaya akademik, dan tata kelola lembaga [3]. Namun, artikel ini memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa dalam konteks Melayu, institusionalisasi moderasi tidak hanya berlangsung melalui perangkat formal, tetapi juga melalui adat, bahasa, hubungan guru-murid, dan praktik sosial komunitas.

Hasil kajian ini juga mendukung Muqowim et al. yang menekankan pentingnya nilai Islam *wasatiyyah* dalam pendidikan madrasah, seperti toleransi, keseimbangan, egalitarianisme, pembaruan, dan prioritas kemaslahatan [4]. Persamaannya terletak pada pemahaman bahwa moderasi merupakan nilai pedagogis yang harus diinternalisasikan dalam proses pendidikan. Perbedaannya, penelitian ini menegaskan bahwa dalam tradisi Islam Melayu, nilai *wasatiyyah* tidak hanya dibangun melalui desain pembelajaran, tetapi juga melalui harmoni antara norma agama dan kearifan lokal yang telah lama membentuk perilaku sosial masyarakat.

Temuan tentang kearifan lokal sebagai filter kultural memiliki keterkaitan dengan Harahap et al. dan Sutrisna, yang menunjukkan bahwa kearifan lokal dapat memperkuat

moderasi beragama melalui nilai musyawarah, kesantunan, penghormatan, dan mekanisme penyelesaian konflik berbasis komunitas [9], [10]. Artikel ini mempertegas bahwa dalam pendidikan Islam Melayu, kearifan lokal bukan sekadar latar budaya, tetapi menjadi instrumen pedagogis yang membantu peserta didik menginternalisasi nilai toleransi secara alami. Dengan kata lain, lokalitas berfungsi sebagai jembatan antara ajaran normatif dan perilaku sosial.

Temuan ini juga sejalan dengan Helmy et al. yang menunjukkan bahwa pesantren Jawa memiliki tradisi pemahaman hadis dan relasi antaragama yang dapat mendukung moderasi [6], serta Mappiasse yang membandingkan toleransi siswa muslim di sekolah umum dan pesantren [16]. Keduanya memperlihatkan bahwa lembaga pendidikan Islam dapat menjadi ruang penting bagi pembentukan toleransi. Namun, fokus artikel ini berbeda karena menempatkan Islam Melayu sebagai konteks kultural yang memiliki mekanisme moderasi khas, yakni melalui integrasi antara adat, adab, dan otoritas keagamaan lokal.

Dalam aspek kebijakan dan kelembagaan, temuan ini memperkuat Nasir dan Rijal serta Mustakim et al. yang menekankan pentingnya lembaga pendidikan tinggi Islam dan peserta didik sebagai agen moderasi [5], [17]. Pendidikan Islam Melayu memperlihatkan bahwa agen moderasi tidak hanya berada pada level peserta didik atau institusi formal, tetapi juga pada jaringan sosial yang menghubungkan guru, ulama, tokoh adat, keluarga, dan masyarakat [23], [24]. Oleh karena itu, penguatan moderasi beragama akan lebih efektif jika dirancang sebagai ekosistem pendidikan berbasis komunitas, bukan hanya sebagai materi kurikulum.

Tantangan transnasionalisme dan digitalitas yang ditemukan dalam kajian ini juga konsisten dengan studi Kamaludin dan Purnama, Febriani dan Ritonga, serta Hanafi et al. yang menunjukkan bahwa era virtual mengubah cara generasi muda mengakses informasi keagamaan dan menuntut strategi moderasi berbasis literasi digital [19], [25], [26]. Perkembangan media sosial membuka ruang belajar agama yang lebih luas, tetapi sekaligus meningkatkan risiko disinformasi, simplifikasi ajaran, dan melemahnya otoritas keilmuan tradisional. Dalam konteks ini, pendidikan Islam Melayu perlu hadir bukan hanya sebagai penjaga tradisi, tetapi juga sebagai produsen wacana digital yang mampu menjelaskan Islam secara ramah, kontekstual, dan berbasis keilmuan.

Kebaruan artikel ini terletak pada konstruksi argumen bahwa moderasi beragama dalam pendidikan Islam Melayu merupakan dialektika antara normativitas dan praktik sosial. Jika sebagian studi terdahulu menekankan kurikulum, kebijakan, atau model pembelajaran moderasi, artikel ini memperlihatkan bahwa moderasi juga dibentuk oleh struktur sosial-budaya yang hidup dalam komunitas Melayu. Dengan demikian, kontribusi artikel ini adalah menawarkan kerangka pembacaan yang menghubungkan *wasatiyyah*, kearifan lokal, budaya lembaga, dan literasi digital dalam satu model konseptual pendidikan Islam Melayu yang inklusif.

Implikasi teoretis dari penelitian ini adalah perlunya memahami moderasi beragama sebagai konsep yang bersifat tekstual sekaligus sosial. Nilai normatif Islam baru menjadi kekuatan pendidikan ketika diterjemahkan ke dalam budaya, relasi sosial, dan praktik kelembagaan. Implikasi praktisnya, lembaga pendidikan Islam Melayu perlu memperkuat kurikulum moderasi melalui pembelajaran berbasis kasus lokal, dialog lintas budaya, pelibatan tokoh adat dan ulama, serta penguatan literasi digital. Implikasi kebijakannya, program moderasi beragama sebaiknya tidak hanya bersifat seragam dari pusat, tetapi memberi ruang bagi model implementasi berbasis lokalitas yang sesuai dengan karakter masyarakat setempat.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena berbasis kajian pustaka sehingga belum menghadirkan data lapangan berupa wawancara, observasi kelas, atau etnografi lembaga pendidikan Islam Melayu. Selain itu, artikel ini belum mengukur secara empiris efektivitas kearifan lokal dalam membentuk sikap moderat peserta didik. Keterbatasan lain adalah cakupan kajian yang masih bersifat konseptual sehingga variasi praktik Islam Melayu di berbagai wilayah belum dapat dipetakan secara mendalam. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan studi kasus, etnografi pendidikan, atau metode campuran untuk menguji bagaimana nilai moderasi diinternalisasikan dalam kurikulum, budaya lembaga, praktik guru, dan perilaku peserta didik di berbagai wilayah Melayu.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa moderasi beragama dalam tradisi pendidikan Islam Melayu merupakan hasil dialektika antara normativitas ajaran Islam dan praktik sosial masyarakat. Secara normatif, nilai *tawassuth*, *tasamuh*, *tawazun*, *i'tidal*, adab, dan kemaslahatan menjadi fondasi bagi pembentukan cara beragama yang seimbang dan inklusif. Secara praktis, nilai tersebut diinternalisasikan melalui keteladanan guru, budaya musyawarah, penghormatan terhadap perbedaan, kearifan lokal, dan pendidikan berbasis komunitas. Kearifan lokal Melayu berfungsi sebagai filter kultural yang menjaga agar ajaran agama tetap hadir secara kontekstual dan harmonis dalam kehidupan sosial. Meskipun demikian, pendidikan Islam Melayu menghadapi tantangan dari paham transnasional dan disrupsi digital yang dapat melemahkan otoritas keagamaan lokal. Oleh karena itu, penguatan moderasi beragama perlu dilakukan melalui integrasi kurikulum, budaya lembaga, keteladanan pendidik, literasi digital, dan revitalisasi kearifan lokal. Artikel ini berkontribusi dengan menawarkan pembacaan integratif bahwa moderasi beragama bukan hanya doktrin atau program kebijakan, melainkan praktik pendidikan yang tumbuh melalui relasi antara teks, budaya, dan kehidupan sosial masyarakat. Penelitian lanjutan perlu menguji temuan ini melalui studi lapangan agar diperoleh bukti empiris tentang efektivitas model pendidikan Islam Melayu dalam membentuk karakter moderat peserta didik.

INFORMASI PENULIS

Penulis Koresponden
Ari Koswara – Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (Indonesia).
Email: ari300915@gmail.com

Penulis
Ari Koswara – Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (Indonesia);
Email: ari300915@gmail.com
Eprianto – Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (Indonesia);
Email: eprianto04@guru.smk.belajar.id
Abdullah Idi – Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (Indonesia);
Email: abdullahidi_uin@radenfatah.ac.id
Abdillah Asmara – Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (Indonesia);
Email: muhammadabdillah@radenfatah.ac.id

KONFLIK KEPENTINGAN

"Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan."

DAFTAR PUSTAKA

[1] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Moderasi Beragama*. Jakarta, Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

[2] Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, *Pedoman Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.

[3] B. Afwadzi and M. Miski, "Religious moderation in Indonesian higher education: Literature review," *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam*, vol. 22, no. 2, pp. 203–231, 2021. https://doi.org/10.18860/ua.v22i2.13446

[4] M. Muqowim, Sibawaihi, and N. D. Alsulami, "Developing religious moderation in Indonesian Islamic schools through the implementation of the values of Islam wasatiyyah," *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, vol. 19, no. 2, pp. 207–222, 2022. https://doi.org/10.14421/jpai.2022.192-03

[5] M. Nasir and M. K. Rijal, "Keeping the middle path: Mainstreaming religious moderation through Islamic higher education institutions in Indonesia," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, vol. 11, no. 2, pp. 213–241, 2021. https://doi.org/10.18326/ijims.v11i2.213-241

[6] M. I. Helmy, A. D. J. Kubro, and M. Ali, "The understanding of Islamic moderation (wasaṭiyyah al-Islam) and the hadiths on inter-religious relations in the Javanese pesantrens," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, vol. 11, no. 2, pp. 377–401, 2021. https://doi.org/10.18326/ijims.v11i2.377-401

[7] J. Fadhilah, V. N. Rista, A. B. Putria, S. E. Asmara, and M. Maryamah, "Nilai-nilai moderasi beragama dalam peradaban Islam Melayu di Palembang," *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, vol. 7, no. 1, pp. 314–319, 2024. https://doi.org/10.54371/jiip.v7i1.3129

[8] A. Azis and A. I. Zulkarnain, "Internalisasi nilai-nilai moderasi beragama dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMP IT se-Kalimantan Tengah," *Anterior Jurnal*, vol. 23, no. 2, pp. 12–23, 2024. https://doi.org/10.33084/anterior.v23i2.6271

[9] S. Harahap, S. Harahap, and S. S. M. Rangkuti an-Nadwi, "Revitalizing local wisdom in realizing religious moderation in Indonesia," *Edudeena: Journal of Islamic Religious Education*, vol. 8, no. 2, 2024. https://doi.org/10.30762/ed.v8i2.4329

[10] Sutrisna, "Local wisdom as the basis for religious moderation in pluralistic Indonesian society to realize Islamic values rahmatan lil 'alamin," *Millati: Journal of Islamic Studies and Humanities*, vol. 6, no. 2, 2021. https://doi.org/10.18326/mlt.v6i2.6581

[11] A. A. Abidin and M. A. Murtadlo, "Curriculum development of multicultural-based Islamic education as an effort to weave religious moderation values in Indonesia," *International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism*, vol. 2, no. 1, pp. 29–46, 2020. https://doi.org/10.47006/ijierm.v2i1.30

[12] M. Abror, "Moderasi beragama dalam bingkai toleransi," *Rusydiah: Jurnal Pemikiran Islam*, vol. 1, no. 2, pp. 143–155, 2020. https://doi.org/10.35961/rsd.v1i2.174

[13] R. Mulyana, "Religious moderation in Islamic Religious Education textbook and implementation in Indonesia," *HTS Teologiese Studies / Theological Studies*, vol. 79, no. 1, 2023. https://doi.org/10.4102/hts.v79i1.8592

[14] N. Azizah, E. Nurdianzah, M. M. Wijaya, T. Azami, and A. Rohman, "Religious moderation in the industrial era 4.0: Deradicalization through the development of intellectual traditions at Fadhlul Fadhlan Islamic Boarding School Semarang," *Jurnal*

Pendidikan Agama Islam, vol. 20, no. 2, pp. 233–246, 2023. https://doi.org/10.14421/jpai.v20i2.7771
[15] H. Basri, A. Suhartini, A. Nursobah, and U. Ruswandi, "Applying higher order thinking skill (HOTS) to strengthen students' religious moderation at Madrasah Aliyah," *Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 8, no. 2, pp. 207–220, 2022. https://doi.org/10.15575/jpi.v8i2.21133
[16] S. Mappiasse, "Students' religious tolerance: Comparing Muslim students at public schools and pesantren," *Journal of Indonesian Islam*, vol. 16, no. 2, pp. 326–351, 2022. https://doi.org/10.15642/JIIS.2022.16.2.326-351
[17] Z. Mustakim, F. Ali, and R. Kamal, "Empowering students as agents of religious moderation in Islamic higher education institutions," *Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 7, no. 1, pp. 65–76, 2021. https://doi.org/10.15575/jpi.v7i1.12333
[18] M. Anzaikhan, "The history of moderate Islam in Indonesia and its influence on the content of national education," *Journal of Al-Tamaddun*, vol. 17, no. 2, pp. 213–226, 2022. https://doi.org/10.22452/JAT.vol17no2.17
[19] F. S. Kamaludin and T. S. Purnama, "Religious moderation strategy in the virtual era and its implication to improving the quality of education," *Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 7, no. 2, pp. 205–216, 2021. https://doi.org/10.15575/jpi.v7i2.14944
[20] S. R. Febriani and A. W. Ritonga, "The perception of millennial generation on religious moderation through social media in the digital era," *Millah: Journal of Religious Studies*, vol. 21, no. 2, pp. 313–334, 2022. https://doi.org/10.20885/millah.vol21.iss2.art1
[21] B. Burhanuddin, "The radicalism prevention through academic policies at State Islamic Higher Education in Indonesia," *Ulumuna*, vol. 26, no. 2, pp. 363–391, 2022. https://doi.org/10.20414/ujis.v26i2.511
[22] N. Burhanuddin and D. Ilmi, "Typologies of religious moderation in Indonesian higher education institutions," *Journal of Indonesian Islam*, vol. 16, no. 2, pp. 455–479, 2022. https://doi.org/10.15642/JIIS.2022.16.2.455-479
[23] M. A. Ma'arif, M. H. Rofiq, and A. Sirojuddin, "Implementing learning strategies for moderate Islamic Religious Education in Islamic higher education," *Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 8, no. 1, pp. 75–86, 2022. https://doi.org/10.15575/jpi.v8i1.19037
[24] Y. Hanafi et al., "Unveiling the intersection of technology and pedagogy: A domain-specific exploration for developing religious moderation content with an exploratory and Rasch perspective," *British Journal of Religious Education*, 2024. https://doi.org/10.1080/01416200.2024.2427303
[25] Y. Purwanto, A. Saepudin, M. R. F. Islamy, and D. Baharuddin, "Tasawwuf moderation in higher education: Empirical study of Al-Ghazālī's Tasawwuf contribution to intellectual society," *Cogent Social Sciences*, vol. 9, no. 1, 2023. https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2192556
[26] M. Mukhibat, M. Effendi, W. H. Setyawan, and M. Sutoyo, "Development and evaluation of religious moderation education curriculum at higher education in Indonesia," *Cogent Education*, vol. 11, no. 1, 2024. https://doi.org/10.1080/2331186X.2024.2302308
[27] C. Chotimah, S. Z. Qudsy, and M. Yusuf, "Superficial implementation of religious moderation in Islamic educational management," *Cogent Education*, vol. 12, no. 1, 2025. https://doi.org/10.1080/2331186X.2024.2442235
[28] M. M. J. Alabdulhadi and K. M. Alkandari, "Practices of Islamic education teachers in promoting moderation (wasatiyyah) values among high school students in Kuwait: Challenges and obstacles," *Cogent Education*, vol. 11, no. 1, 2024. https://doi.org/10.1080/2331186X.2024.2365577

[29] G. Prasetyo, “From policy to pedagogy: Religious moderation as a counter-radicalization strategy in Islamic education—A systematic literature review,” *Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 14, no. 2, pp. 233–251, 2025. https://doi.org/10.14421/jpi.2025.142.233-251
[30] A. Athoillah, A. S. Rahman, A. S. Firdaus, and M. A. Septiadi, “Policies and practices religious moderation in pesantren,” *Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 10, no. 2, pp. 387–396, 2024. https://doi.org/10.15575/jpi.v10i2.27543
[31] M. E. Mahmud, “School leadership models and efforts reconstruction of religious moderation in State Madrasah Aliyah in Indonesia,” *Educational Process: International Journal*, vol. 14, 2025. https://doi.org/10.22521/edupij.2025.14.18
[32] Y. Purwanto, E. Firdaus, and A. Faqihuddin, “Teaching religious moderation to pre-service teachers: An Indonesian case study,” *Religious Education*, vol. 119, no. 4, pp. 307–320, 2024. https://doi.org/10.1080/00344087.2024.2385174